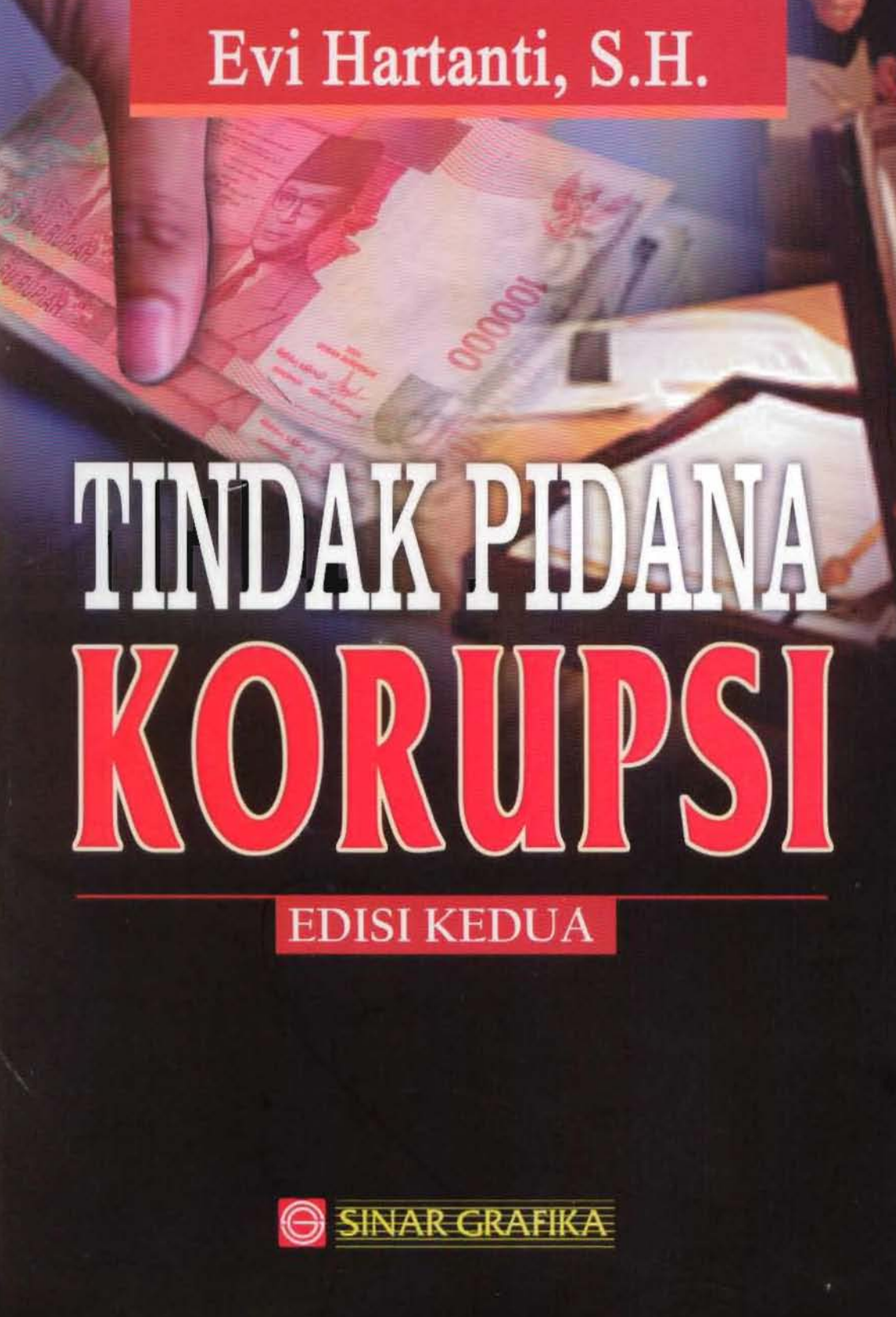




Evi Hartanti, S.H.

TINDAK PIDANA KORUPSI

EDISI KEDUA



SINAR GRAFIKA



Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan dari rakyat sebagai warga negara dapat berkurang.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan usaha yang serius dari pemerintah melalui *political will*-nya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Buku ini merupakan pengetahuan dasar mengenai tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dipengadilan serta dilengkapi dengan kasus-kasus aktual tindak pidana korupsi.

Keberadaan buku ini sangat cocok dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini karena pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi

Para mahasiswa, praktisi kebijakan negara, aparat hukum dan aparat negara, serta masyarakat luas dapat mendayagunakan materi yang disajikan buku ini.

ISBN (13) 978-979-007-037-0

ISBN (10) 979-007-037-3



9 789790 070370

Tipikor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA	vii
 BAB 1 TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HU- KUM	 1
 BAB 2 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	 5
A. Pengertian Tindak Pidana	5
B. Korupsi	8
C. Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Ko- rupsi	12
D. Pendapat para Pakar tentang Korupsi	17
 BAB 3 PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI	 22
A. Umum	22
B. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 .	24
C. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	25
 BAB 4 WEWENANG JAKSA DAN POLRI SERTA PERANAN- NYA	 34
A. Pengertian Kejaksaan	34
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	34
C. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Ter- tentu	40
D. Kewenangan Polri	41
 BAB 5 MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KO- RUPSI.....	 43
A. Pemeriksaan Pendahuluan	43

B.	Penuntutan	48
C.	Pemeriksaan Akhir	49
BAB 6	PUTUSAN HAKIM	54
A.	Definisi Putusan Hakim	54
B.	Pidana Menurut Pasal 10 KUHP	57
C.	Teori Pemidanaan	59
D.	Konsep Pemidanaan	62
E.	Penggolongan Putusan Hakim Menurut KUHP	62
F.	Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	63
G.	Formalitas yang Harus Terdapat dalam Putusan Hakim	65
H.	Barang Bukti dalam Proses Pidana	66
BAB 7	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	69
A.	Umum	69
B.	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK	70
C.	Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan	71
D.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	73
BAB 8	BEBERAPA CONTOH KASUS KORUPSI	75
A.	Kasus Korupsi Akbar Tanjung	75
B.	Kasus Korupsi Syahril Sabirin	82
C.	Kasus Korupsi Probo Soetedjo	83
D.	Kasus Korupsi Rahadi Ramelan	83
E.	Kasus Korupsi Hamas Ghanny	84
F.	Kasus Korupsi DPRD Sukoharjo	84
G.	Kasus <i>Money Politics</i> DPRD Pati	85
H.	Kasus Korupsi Puskud Jateng	90
I.	Kasus Korupsi Kades Ringinharjo, Grobogan	94
J.	Kasus Korupsi Kades Sumberejo, Kendal	94
K.	Kasus Korupsi dr. Dyah Agustina Wuryani	96
L.	Kasus Dugaan Korupsi Mantan Dispenda Karanganyar ...	97
M.	Penyidikan Kasus Korupsi Beddu Amang	97
N.	Penyidikan Kasus Korupsi Dana Rekening 502	98
BAB 9	BADAN PEMBERANTAS KORUPSI	99
A.	Tim Pemberantasan Korupsi	99
B.	Komite Anti Korupsi	99
C.	Komisi Empat	99
D.	Opstib	99
E.	Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)	100

F.	KPKPN	100
G.	TGPTPK	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
--------------------------------	------------